

BPK Segera Laporkan ke DPR

Audit Hambalang Tuntas

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru merampungkan 85 persen hasil audit investigasi terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kendati belum rampung seluruhnya, namun hasil audit sementara ini akan tetap diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada Rabu (24/10), BPK telah melaksanakan sidang BPK dan menyepakati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigatif atas P3SON proyek Hambalang sebagaimana dibahas pada hari ini ditetapkan sebagai LHP Pertama," ujar Ketua BPK, Hadi Poernomo, Rabu (24/10), di Gedung BPK, Jakarta.

LHP tahap pertama itu, lanjut Hadi, akan disampaikan kepada DPR pada 31 Oktober 2012 dan segera disampaikan pula kepada KPK. Sebelum laporan itu diserahkan, Hadi mengaku pihaknya sama sekali tidak bisa menyampaikan hasil audit itu.

"Setelah 31 Oktober, kalau mau tanya apa saja, bisa saya jawab. Tapi kalau sekarang, belum bisa karena ada kode etik dan undang-undang yang melindunginya," kata Hadi lagi.

Hadi menambahkan, pihaknya juga memberikan laporan itu kepada KPK karena dari hasil temuan tim pemeriksa BPK, proyek Hambalang ini terdapat indikasi tindak pidana. "Ya karena kami lihat ini ada indikasi tindak pidana, makanya kami juga serahkan ke KPK," imbuh Hadi.

Desakan publik atas independensi audit BPK terus dilontarkan berbagai pihak. Kisruh audit BPK terkait proyek Hambalang bermula dari pernyataan anggota BPK Taufiequrachman Ruki, yang menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak

Setelah 31 Oktober, kalau mau tanya apa saja, bisa saya jawab. Tapi kalau sekarang, belum bisa karena ada kode etik dan undang-undang yang melindunginya.

HADI POERNOMO

Ketua BPK

dinyatakan terlibat.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, pekan lalu.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang, antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar, selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Di dalam kasus ini, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga, sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan, apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

Deddy juga sempat mengatakan tidak ingin dikorbankan sendiri dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri, melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan, mengatakan belum akan memberikan pertimbangan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait status Andi Mallarangeng, sebagai Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora) pada skandal Hambalang.

Wantimpres memberikan pertimbangan umum kepada Presiden, bukan pertimbangan khusus, seperti apakah Kepala Negara patut mencopot orang yang diduga korupsi.

"Saya berharap pejabat pemerintah mengetahui (konsekuensi) tindakannya sesuai dengan hukum yang ada dan kebijakan terhadap masalah itu sesuai dengan pertimbangan hukum," ujar Albert di Kantor Wantimpres, Jakarta, Rabu (24/10).

Albert mengatakan, tidak mengetahui apakah Presiden pernah meminta pertimbangan pada Wantimpres terkait status Andi Mallarangeng. Pertimbangan Presiden mengenai status Andy, menurutnya, harus datang dari Wantimpres. (kompas.com)



PEMERIKSAAN KASUS HAMBALANG - Ketua BPK Hadi Poernomo memaparkan perkembangan pemeriksaan kasus Wisma Atlet Hambalang, di Jakarta, Rabu (24/10). BPK telah menyepakati hasil pemeriksaan Kasus Hambalang dan akan menyerahkan ke DPR pada 31 Oktober 2012, serta membantah intervensi dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp 10 miliar.

Zulfadhli: Jangan Ulur Waktu

ANGGOTA Panitia Kerja (Panja) Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, (P3SON) Hambalang DPR, meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menyerahkan audit investigatifnya sebelum reses, Kamis (25/10).

"Tentu kita tetap mengharapkan sesuai dengan yang disampaikan komisioner BPK bahwa harus segera diserahkan, paling lambat Kamis (25/10), karena penutupan masa sidang. Ini sudah terlalu lama, 9 bulan. Tentu akan menjadi masukan yang penting dalam menuntaskan kasus Hambalang," kata Zulfadhli di Gedung

DPR, Jakarta, Rabu (24/10).

Zulfadhli memperkirakan, BPK segera mengulur waktu terkait hasil audit investigatifnya terhadap proyek Hambalang. "Kalau diundur akan menambah keyakinan ada dugaan persoalan di internal BPK. Bisa saja terjadi intervensi, kenapa BPK lama benar," ujar politisi Golkar itu.

Hasil audit investigatif BPK 1 Oktober 2012 yang beredar di kalangan wartawan, tidak menyebutkan nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng. "Bila memang nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng tak masuk sebagai pihak yang bertanggung jawab

atas proyek Hambalang, Panja Hambalang bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR akan mendalami audit BPK tersebut. Jika ditemukan tidak ada nama Menpora, Andi Mallarangeng, kita minta direview (LHP)," kata Zulfadhli.

Panja Hambalang, kata dia, juga belum mendapatkan laporan soal aliran dana Hambalang sebagaimana yang diungkap Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yunus.

"Kita belum dapat resmi soal aliran dana Hambalang dari PPATK. Tentu informasi PPATK itu sangat penting," sebut dia. (ant)